

**PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DISDUKCAPIL
KABUPATEN TRENGGALEK**

(Studi Pada Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi

Persyaratan Guna Meraih Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Malang



Disusun oleh :

Anggita Kirana Hayu Mahanani

202010050311077

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024


PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN LAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DISDUKCAPIL KABUPATEN TRENGGALEK
(Studi Pada Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek)

Diajukan Oleh:

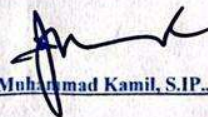
Anggita Kirana Havu Mahanani
202010050311077

Telah disetujui
Pada hari / tanggal, *Senin / 8 Juli 2024*

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan


Muhammad Kamil, S.IP., M.A

Pembimbing


Muhammad Kamil, S.IP., M.A

Mengetahui



Najamuddin, S.Pd., S.P., M.Hub.Int

SKRIPSI

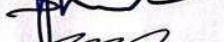

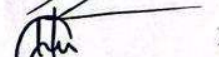
Dipersiapkan dan disusun oleh:

Anggita Kirana Hayu Mahanani
202010050311077

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan
L U L U S

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan
Pada hari Rabu, 19 Juni 2024
Dihadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji:

1. **Muhammad Kamil, S.IP., M.A** ()
2. **Prof. Dr. Asep Nurjaman, M.Si** ()
3. **Iradhad Taqwa Sihidi, M.A** ()

Mengetahui
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Najamuddin Shamsulrijal, S.IP., M.Hub.Int



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

fisip.umm.ac.id | fisip@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anggita Kirana Hayu Mahanani
NIM : 202010050311077
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :
Peran DPRD Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek (Studi Pada Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek) adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 29 April 2024
Yang Menyatakan,

Anggita Kirana Hayu Mahanani



Kampus I
Jl. Berrung 1 Malang Jawa Timur
P. +62 341 561 253 (Hunting)
F. +62 341 490 435

Kampus II
Jl. Bendungan Sileri No. 188 Malang Jawa Timur
P. +62 341 551 149 (Hunting)
F. +62 341 552 080

Kampus III
Jl. Raya Tlogomas No. 248 Malang Jawa Timur
P. +62 341 404 318 (Hunting)
F. +62 341 480 435
E. webmaster@umm.ac.id



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

**SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:

Nama : Anggita Kirana Hayu Mahanani
NIM : 202010050311077
Judul TA/Skripsi : Peran DPRD Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek (Studi Pada Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek)
Pembimbing : Muhammad Kamil, S.IP., MA

Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
1	1%	9%	11%	0%	2%

Administrator,

Muhammad Iqbal, S. Pd

Malang, 8 Juni 2024

Ket. Prodi Ilmu Pemerintahan



Muhammad Kamil, S.IP., MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Peran DPRD dalam Pengawasan Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek (Studi Pada Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek)". Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, nabi sekaligus Rasul yang menjadi panutan kita semua. Dengan segala perjuangan, akhirnya saya sampai dititik ini. Tidak ada kata yang dapat mewakili rasa Syukur dan bangga penulis karena dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Dengan segala usaha dan kerja keras, serta dukungan, bimbingan, dan arahan yang diberikan, termasuk hasil diskusi yang sangat berharga dengan berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini, dengan rendah hati, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M. Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai.
2. Prof. Dr. Muslimin Machmud, M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, telah memberikan izin penelitian untuk mendukung kelancaran penyusunan skripsi saya.
3. Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang dan sebagai Dosen Pembimbing skripsi saya, telah memberikan semangat, arahan, saran, dan bimbingan dengan kesabaran, sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tak ternilai harganya serta motivasi dan semangat kepada saya selama menempuh Pendidikan menjadi Mahasiswa.
5. Bapak Mohtarom selaku Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang sudah menerima penulis untuk melaksanakan magang riset juga penelitian guna menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Sugeng dan Ibu Sri Wahyuni, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, motivasi, nasehat, serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Terima kasih karena selalu menemani penulis hingga menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik. Terimakasih atas pengorbanan dan perjuangan untuk hidup saya.
7. Cinta kasih ketiga saudara saya, Intan Firasti, Galang Hakiki dan Nurani Safitri yang selalu memberikan semangat tanpa henti, dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis.

8. Prihantaniga Surendra yang selalu menemani, meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah dan menghibur ketika penulis mengalami kesulitan, serta selalu memberikan dukungan tiada henti. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
9. Novanda Failya Prasasti, sahabat sekaligus saudara bagi saya. Terimakasih sudah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran, serta semangat yang tiada henti ketika penulis mengalami masa sulit dalam menyelesaikan naskah skripsi ini.
10. Teman-teman seperbimbingan yang selalu saling menguatkan dan meyakinkan bahwa kami bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada diri saya sendiri Anggita Kirana Hayu Mahanani, karena sudah berjuang sejauh ini dan tetap bertahan dalam masa-masa sulit, mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala lika-likunya dengan mengerahkan segala tenaga dan pikiran serta senantiasa menikmati proses yang tidak mudah ini. Terimakasih sudah berjuang dan bertahan.

Penulis dengan sepenuh hati menyadari bahwa naskah skripsi ini masih belum mencapai tingkatan kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala jenis saran, kritik, dan masukan yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan, baik bagi pembaca maupun penulis sendiri.

Malang, 25 Maret 2024

Anggita Kirana Hayu M

ABSTRAK

Pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Trenggalek menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya yaitu pemungutan pajak, praktik calo, dan lamanya proses pengurusan dokumen seperti kepengurusan berkas Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keliarga (KK). Penelitian berjudul "Peran DPRD dalam Pengawasan Layanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan layanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil. Dan untuk mengetahui apasaja faktor penghambat DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek.

Teori menurut James Madison, sesuai dengan pemikiran politiknya, cenderung berkaitan dengan konsep "checks and balances" atau pemeriksaan dan keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah. Madison percaya bahwa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, setiap cabang pemerintah harus memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengontrol cabang pemerintah lainnya. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang artinya penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang lebih mendalam terhadap fenomena atau objek yang diteliti. Pendekatan deskriptif fokus pada pengumpulan dan analisis data secara rinci untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik, perilaku, atau kondisi dari subjek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, DPRD Kabupaten Trenggalek memainkan peran yang cukup baik dalam pengawasan layanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil. Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek rutin menggelar Rapat Komisi dengan mitra kerja komisi seperti Disdukcapil, Kegiatan Mening Deh bersama Bupati merupakan salah satu pengawasan langsung yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek. Kendala yang dialami oleh Komisi I ialah banyaknya jumlah mitra komisi, menyulitkan pengawasan menyeluruh. Serta kurangnya integritas anggota Komisi I ditunjukkan dengan beberapa anggota komisi yang tidak aktif sehingga mengurangi efektivitas pengawasan. Komisi I berupaya mengatasi hal ini dengan meningkatkan komunikasi, memperkuat tanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik kelompok.

Kata Kunci : *Peran, Pengawasan, Pelayanan Publik, Kesadaran Kolektif.*

ABSTRACT

Population administration services in Trenggalek Regency face several problems, including tax collection, scalper practices, and the length of the process of managing documents such as the management of Identity Card (KTP) and Keliarga Card (KK) files. The research entitled "The Role of DPRD in Supervision of Population Administration Services Disdukcapil Trenggalek Regency". The purpose of this study is to find out how the role of the DPRD in supervising the implementation of Disdukcapil Population Administration services. And to find out what are the inhibiting factors of the DPRD in supervising the implementation of population administration services Disdukcapil Trenggalek Regency.

Theories according to James Madison, in accordance with his political thinking, tend to be related to the concept of "checks and balances" or checks and balances of power between branches of government. Madison believed that to prevent abuse of power, each branch of government should have the ability to oversee and control other branches of government. This research method is descriptive qualitative, which means that this research is carried out with a more in-depth approach to the phenomenon or object under study. The descriptive approach focuses on collecting and analyzing detailed data to describe or explain the characteristics, behaviors, or conditions of the research subject.

Based on the results of the study, the Trenggalek Regency DPRD plays a fairly good role in supervising Disdukcapil Population Administration services. Commission I of the Trenggalek Regency DPRD routinely holds Commission Meetings with commission partners such as Disdukcapil, Mening Deh activities with the Regent are one of the direct supervision carried out by Commission I of the Trenggalek Regency DPRD. The obstacle experienced by Commission I was the large number of commission partners, making it difficult for comprehensive supervision. As well as the lack of integrity of Commission I members is shown by some inactive commission members, reducing the effectiveness of supervision. Commission I sought to address this by improving communication, strengthening responsibility, and putting community interests above group political interests.

Keywords : Role, Supervision, Public Service, Collective Awareness.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN CEK PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Teoritis	15
1.5 Definisi Konseptual	16
1.5.1 Peran	16
1.5.2 Pengawasan	16
1.5.3 Pelayanan Administrasi Kependudukan.	17
1.6 Definisi Operasional	19
1.7 Metode Penelitian	19
1.8 Sumber Data.....	20

1.8.1	Sumber data primer.....	20
1.8.2	Sumber data sekunder.....	20
1.9	Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.9.1	Observasi.....	21
1.9.2	Wawancara.....	22
1.9.3	Dokumentasi.....	22
1.10	Teknik Analisis Data.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		24
2.1	Penelitian Terdahulu.....	24
2.2	Kerangka Teori.....	28
2.2.1	Peran.....	28
2.2.2	Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	31
BAB III DESKRIPSI WILAYAH.....		38
3.1	Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek.....	38
3.1.1.	Kondisi Topografi.....	38
3.1.2.	Perekonomian Daerah Kabupaten Trenggalek.....	39
3.1.3.	Visi Visi Kabupaten Trenggalek.....	39
3.1.4.	Kondisi Masyarakat Kabupaten Trenggalek.....	40
3.1.5.	Kondisi Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek.....	42
3.1.6.	Kondisi Tata Kelola Komisi 1 DPRD Kabupaten Trenggalek.....	43
3.2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek.....	45
3.2.1	Visi dan Misi.....	45
3.2.2	Tugas Pokok dan Fungsi.....	46
3.2.3	Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek.....	55

3.2.4	Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	56
3.3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	57
3.3.1	Visi dan Misi	57
3.3.2	Tugas Pokok dan Fungsi	57
3.3.3	Struktur Organisasi	59
BAB IV HASIL PENELITIAN		60
4.1	Pelaksanaan Layanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Trenggalek.	60
4.2	Pengawasan Langsung oleh Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Dalam Proses Pelayanan Administrasi kependudukan	78
4.3	Pengawasan Tidak Langsung oleh Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek Dalam Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan.	89
BAB V PENUTUP		102
5.1	Kesimpulan.....	102
5.2	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....		104
LAMPIRAN		108

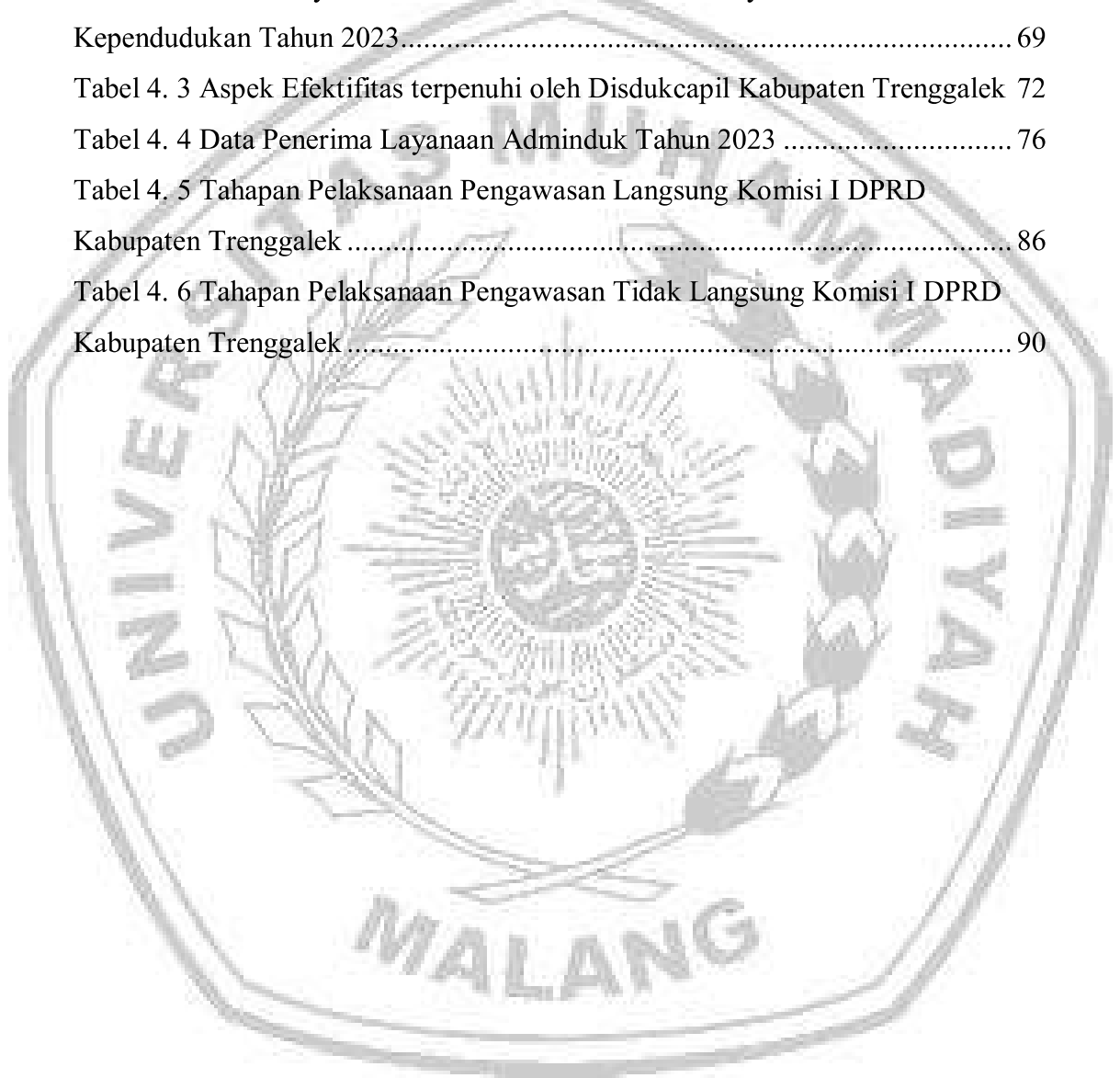
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model analisis data interaktif Miles & Huberman	23
Gambar 4. 1 Alur Proses Pelayanan Adminduk	63



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kondisi Masyarakat Kabupaten Trenggalek.....	40
Tabel 4. 1 Data Disabilitas Penerima Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2023.....	67
Tabel 4. 2 Data Masyarakat Miskin Ekstrim Penerima Layanan Administrasi Kependudukan Tahun 2023.....	69
Tabel 4. 3 Aspek Efektifitas terpenuhi oleh Disdukcapil Kabupaten Trenggalek	72
Tabel 4. 4 Data Penerima Layanan Adminduk Tahun 2023	76
Tabel 4. 5 Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Langsung Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek	86
Tabel 4. 6 Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Tidak Langsung Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek	90



DAFTAR PUSTAKA

- Anam, S., & Anwar, K. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik. *Reformasi*, 10(1), 61–69. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582>
- Angliawati, R. Y. (2016). Peran Remunerasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Theoretical Review. *Ecodemica*, IV(2), 203–213. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica>
- Aprilia, S., & Kurniawan, B. (2022). Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Secara Online Paket Lengkap (SIMINAKSOPAL) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek). *Publika*, 10(4), 1243–1256. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1243-1256>
- Azharada, A., & Meiwanda, D. G. (2022). Implementation of Regent Regulation Number 24 of 2017 Concerning the Establishment of Services Work Units in Population Administration Services in Pesisir Selatan Regency. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2), 113.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Trenggalek. (2023). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Trenggalek 2023*.
- bendorejo-pogalan.trenggalekkab.go.id. (2022). *Komisi 1 DPRD Dan DPMD Kabupaten Trenggalek Adakan BIMTEK*. <https://bendorejo-pogalan.trenggalekkab.go.id/first/artikel/203-KOMISI-1-DPRD-DAN-DPMD-KABUPATEN-TRENGGALEK-ADAKAN-BIMTEK>
- Budiyono, B. (2013). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v7no1.368>
- Chandranegara, I. S. (2016). Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi Incorporation of Checks and Balances into Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 552–574.

- Creswell, J. w. (2013). Five Approaches to Inquiry. In *Qualitative inquiry & research design* (pp. 53–84).
- DetikNews. (2017). *Dispendukcapil Jemput Bola Rekam Data KTP Elektronik Siswa SLB*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3497859/dispdukcapil-jemput-bola-rekam-data-ktp-elektronik-siswa-slb>
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. (2023). *Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra-P)*.
- Fatikha, A. C. (2016). Reinventing Government dan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(1), 90–97.
- Huda, M. I. N. (2016). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Bandung terhadap pembuatan kartu keluarga di Kota Bandung dihubungkan dengan Perda Kota Bandung nomor 16 tahun 2011 tentang pelayanan publik*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Husni. (2016). Peranan Organisasi Dalam Meningkatkan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Konsep Dasar Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dasar*, 48, 1–16.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Pemerintah Indonesia.
- Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kabupaten Trenggalek. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek*.
- Kawahe, L., Tulusan, F. M. ., & Kiyai, B. (2016). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KINERJA ORGANISASI (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(37), 1–10.
- Koentjaraningrat. (1987). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota

- Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48), 2.
- Madjid, L. (2017). Optimalisasi Pelayanan Publik Perspektif David Osborne. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 8(2), 130–140.
- Mansien, A. P. (2020). Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 128–150. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.109>
- Nadeak, J., Tarigan, P., Nasution, F. A., & Agusmidah. (2014). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Eksekutif di Kota Medan. *USU Law Journal*, 2(1), 211–229.
- Niko, N., & Sudi, A. (2019). Implementasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dprd (Studi Kasus Dprd Kabupaten Mamasa Periode 2014-2019). *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(2). <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/mitzal/article/view/461%0Ahttps://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/mitzal/article/download/461/380>
- PERPUB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pada Cafe Pelayanan Publik (2021).
- Putri, G. R. (2013). *ANALISIS TEORI STRUKTURASI PADA PROSES PEMBENTUKAN PANDANGAN, PEMAHAMAN DAN MINAT TERHADAP PROFESI PUSTAKAWAN (Studi Etnometodologi tentang Profesi Pustakawan di Kalangan Mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga)*. Universitas Airlangga Surabaya.
- Rasid Pora; Sahrul Por; Nurain Talib; Raoda M. Djae; Parto Sumtak. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelayanan Publik di Kota Ternate. *Jurnal Government of Archipelago*, 4(1), 39.
- Rohman, Didik , Fatkhur ; Imam, H. M. H. (2010). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang) Didik Fatkhur Rohman, Imam

Hanafi, Minto Hadi. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang*, 1(5), 962–971.

Saldi, T. (2022). *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu*. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

Saldi, T., Moenta, A. P., & Riza, M. (2022). Fungsi Dewan Rakyat Daerah Pada Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pasangkayu. *Indonesia Journal of Criminal Law*, 4(1), 133–143.

Sujana, B. J., Suwarlan, E., & Sujai, I. (2023). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. *MIDA Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi*, 20(2), 223–236.

Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Kencana Media.

Trenggalek, D. P. R. D. K. (2020). *Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Tata Tertib dan Prosedur Pengawasan*. DPRD Kabupaten Trenggalek.

Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>

Widjojo, A. (2015). *Peranan DPRD Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan Di Kabupaten Pati*. Test thesis, Universitas Muria Kudus.